

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI DESA TIBONA KECAMATAN BULUKUMPA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**SKRIPSI**



**KHUSNUL KHAIRIAH**

**105731118719**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN :**

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI DESA TIBONA KECAMATAN BULUKUMPA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**KHUSNUL KHAIRIAH  
105731118719**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“ Jangan Biarkan Penilaian Buruk Orang Lain Membuat Kamu Merasa Buruk  
Ataupun Bersalah Ini Hidupmu Jalani Seperti Yang Kamu Inginkan”**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji Syukur Kepada Allah Swt Atas Ridho Nya Serta Karunianya Sehingga  
Skripsi Ini Telah terselesaikan Dengan Baik  
Alhamdulillah Rabbil'amin**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Saya Bapak  
Ahmadong Dan Ibu Mariati Yang Telah Senantiasa Memberikan Doa  
Dukungan Moral Dan Moril Yang Takterhingga**

### **PESAN DAN KESAN**

**Setiap Kekalahan, Setiap Kesedihan, Setiap Patah Hati Mengandung  
Pelajarannya Sendiri, Dan Akan Meningkatkan Kinerja Kamu Di Waktu  
Berikutnya.**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam  
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa  
Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten  
Bulukumba.

Nama Mahasiswa : Khusnul Khairiah

No. Stambuk/ NIM : 105731118719

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia  
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 16 Juni 2023 di Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 16 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Amran, SE., M.Ak., Ak., CA  
NIDN : 0915116902

Pembimbing II

Asriani Hasan, SE., M.Sc  
NIDN : 09160289902



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
NBM : 0902116603



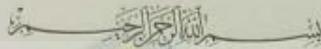
Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak  
NBM : 128 6844



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Khusnul Khairiah, Nim: 105731118719 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 18 Dzulhijjah 1444 H /07 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Dzulhijjah 1444 H  
07 Juni 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suami, S.E., M.Acc.  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Amril, SE., M.Si., Ak, CA  
2. Endang Winarsih, SE, M, Ak  
3. Asriani Hasan, SE., M.Sc  
4. Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

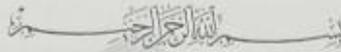
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.

NBM : 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khairiah

Stambuk : 105731118719

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Juli 2023

Membuat Pernyataan,



**Khusnul khairiah**

**NIM: 105731118719**



Dekan

**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.**

**NBM:651 507**

Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi

**Mira, SE, M.Ak., Ak**

**NBM:1286 844**

**HALAMAN PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khairiah  
NIM : 105731118719  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Khusnul khairiah**  
**NIM: 105731118719**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, yang merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah atas Ridho-Nya Allah SWT, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. h. Andi Jam'an, SE, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak.,CA. Selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak Amran, SE.,M.Ak.,Ak.,CA. Selaku Pembimbing I Yang Telah Berkenan Membantu Dan Memberikan Arahkan Dalam Penyusunan Skripsi.

5. Ibu Asriani Hasan, SE.,M.Sc. selaku pembimbing II Yang Telah Berkenan Membantu Dan Memberikan Arahan Dalam Penyusunan Skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Yang Telah Memberikan Ilmunya Kepada Penulis Selama Mengikuti Kuliah.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
8. Orang Yang Paling Istimewa Dalam Hidup Penulis Yaitu Mama Dan Bapak Yang Telah Berjasa Dalam Mendidik Serta Motivasi Dan Doa Yang Tidak Berujung Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Tulisan ni.
9. Teman-teman saya Tiwi, Erma, Nadia Yang Tidak Sedikit Bantuannya Dan Dorongan Dalam Aktivitas Studi Penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat motivasi kepada penulis untuk segala hal dalam menyelesaikan tulisan ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat menambah wawasan yang telah ada kepada kita semua, sehingga dapat dijadikan bekal kehidupan kita.

Makassar 10 Mei 2023

Khusnul Khairiah

## ABSTRAK

**KHUSNUL KHAIRIAH, 2023 , Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Utama (Amran) dan Co-Pembimbing (Asriani Hasan)**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif .populasi dan sampel dalam penelitian ini seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, jumlah wajib pajak bumi dan bangunan berjumlah 3.310 jiwa. Teknik analisis data menggunakan observasi dan kuesioner . teknik analisis data menggunakan rumus uji t-test, hipotesis awal ( $H_1$ ) penelitian minimal 65 persen. Perhitungan t-test satu sampel dengan menguji t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 76,17 % . artinya bahwa  $H_1$ diterima dan  $H_2$  ditolak karena mencapai 76,17 % dari angka paling rendah 65%. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

Kata kunci : Partisipasi, Tingkat, Wajib Pajak , PBB

## ABSTRACT

**KHUSNUL KHAIRIAH, 2023, The Level of Community Participation in Land and Building Tax Payment in Tibona Village, Bulukumpa District, Bulukumba Regency. Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Main Supervisor (Amran) and Co-Supervisor (Asriani Hasan)**

This study was conducted to determine how much the level of community participation in paying land and building tax in Tibona Village, Bulukumpa District, Bulukumba Regency and the factors that affect it. Uses a descriptive quantitative approach method .population and sample in this study all land and building taxpayers in Tibona Village, Bulukumpa District, Bulukumba Regency, the number of land and building taxpayers amounted to 3,310 people. data analysis techniques using the t-test formula, the initial hypothesis ( $H_1$ ) of the study is at least 65 percent. The calculation of the t-test of one sample by testing of t-count is greater than the t-table which is 76.17%. meaning that  $H_1$  is accepted and  $H_2$  is rejected because it reaches 76.17% of the lowest figure of 65%. Thus, the level of community participation is quite good.

Keyword : Participation, Rate, Taxpayer, PBB



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iError! Bookmark not defined.i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II</b> .....	5
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Tinjauan Teori .....	5
1. Pengertian Tingkat Partisipasi .....	5
2. Pengertian Pajak .....	10
3. Fungsi pajak .....	11
4. Jenis Pajak .....	12
5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	14
B. Penelitian Terdahulu .....	21
C. Kerangka Pikir Penelitian .....	28
D. Hipotesis Penelitian .....	28
<b>BAB III</b> .....	31

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A.Jenis Penelitian .....	31
B.Tempat dan Waktu.....	31
C.Populasi dan Sampel.....	31Error! Bookmark not defined.
D.Metode Pengumpulan Data .....	32
E.Teknik Analisis .....	32
<b>BAB VI. ....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A.Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
1.Karakteristik Lokasi Penelitian .....	33
2.Visi dan Misi.....	33
3.Struktur Organisasi.....	34
B.Deskripsi Data .....	35
1. Identitas Responden.....	35
2.Kelompok Umur .....	35
3.Jenis Pekerjaan .....	36
C.Hasil Uji dan Validitas Data.....	38
D.Analisis Data.....	47
E.Pembahasan .....	49
F.Kesesuaian dengan penelitian terdahulu.....	50
<b>BAB V.PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A.KESIMPULAN .....	51
B.SARAN .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu .....	21
Tabel 4.1 identitas responden berdasarkan jenis kelamin .....	35
Tabel 4.2 identitas responden berdasarkan usia .....	35
Tabel 4.3 identitas responden berdasarkan pekerjaan .....	37
Tabel 4.4 tanggapan responden tentang membayar PBB .....	39
Tabel 4.5 tanggapan responden tentang membayar pajak PBB tepat waktu .....	39
Tabel 4.6 tanggapan responden tentang memiliki kewajiban membayar pajak .....	40
Tabel 4.7 tanggapan responden yang mengetahui dan paham tentang PBB yang harus dibayar .....	40
Tabel 4.8 tanggapan responden tentang penghasilan WP berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak.....	41
Tabel 4.9 tanggapan responden tentang besarnya PBB sesuai dengan pendapatan.....	41
Tabel 4.10 tanggapan responden tentang jaeak tempat tinggal membuat masyarakat malas membayar pajak .....	42
Tabel 4.11 tanggapan respondententang tempat pembayaran pajak yang sulit dijangkau.....	43
Tabel 4.12 tanggapan responden tentang besaran penghasilan WP maka semakin besar jumlah pajak terhutang dibayarkan .....	43
Tabel 4.13 tanggapan responden tentang pekerjaan memudahkan membayar pajak PBB .....	44
Tabel 4.14 tanggapan responden tentang pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi .....	45
Tabel 4.15 tanggapan responden tentang sistem pajak yang mudah dipahami .....	45

**Tabel 4.16 tanggapan responden tentang penyuluhan yang diberikan oleh  
petugas pajak..... 46**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi .....	34



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan yang berada di atasnya. PBB merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Indonesia memiliki sejarah panjang dan bervariasi. Pada awalnya, tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB masih relative rendah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB mulai meningkat.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, seperti kampanye sosialisasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberian insentif bagi masyarakat yang taat dalam membayar PBB. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Terutama tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di desa.

Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, pembayaran PBB di desa juga masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di desa. Antara lain adalah tingkat

kesadaran masyarakat yang masih rendah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar pajak, kurangnya pemahaman tentang kebijakan dan aturan PBB, serta kurangnya keterbukaan dan transparansi dari pihak pemerintah dalam pengelolaan PBB.

Selain itu, di desa tibona seringkali terdapat masalah dalam pengelolaan data tanah dan bangunan yang tidak akurat, sehingga mempersulit proses perhitungan besarnya PBB yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat kurang percaya dan tidak mau membayar pajak.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di desa tibona upaya perbaikan sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, seperti dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan memberikan kemudahan akses untuk membayar. Namun, perlu dilakukan upaya lebih lanjut seperti peningkatan kualitas data tentang tanah dan bangunan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PBB. Oleh pihak pemerintah desa, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di desa tibona. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di desa tibona dapat meningkat, sehingga dapat membantu mempercepat pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul **“Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak: Hal ini dapat membantu pemerintah desa untuk mengetahui seberapa besar sumber pendapatan yang dapat diperoleh dari PBB , sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak: pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak. Misalnya dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan: pemerintah desa dapat memperbaiki partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Misalnya mengadakan musyawarah desa untuk membahas penggunaan dana pajak yang sudah terkumpul, sehingga

masyarakat merasa memiliki dan teerlibat dalam pengambilan keputusan.

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana pajak dilakukan dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa.
5. Memberikan masukan bagi pemerintah: pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program atau kebijakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Tingkat Partisipasi**

Partisipasi merupakan proses komunikasi dua arah yang berkesinambungan yang meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keseluruhan proses operasional. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu atau kelompok individu dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, dan memberikan solusi alternatif dengan gagasan, keahlian, waktu, modal, atau materi dalam program pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah.

Berikut pengertian dan makna partisipasi dari berbagai sumber buku:

- a. Menurut (Adriani, 2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.
- b. Menurut (Handayani, 2017) Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan . Adapun faktor-faktor yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut *Department for International Development (DFID) Guide to Implementing a Participatory Approach*, prinsip partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya, setiap orang, terlepas dari tingkat dan struktur para pihak, memiliki keahlian, keterampilan dan inisiatif serta hak untuk menggunakan inisiatif tersebut dalam setiap proses pembangunan dialog.
- b. Semua pihak harus mampu membina komunikasi yang terbuka dan positif serta suasana dialog. Berbagai pihak harus mampu menyeimbangkan kekuasaan dan pembagian kekuasaan untuk menghindari dominasi.
- c. Tanggung Jawab Bersama Karena kekuasaan dan partisipasi bersama dalam proses pengambilan keputusan dan tahapan selanjutnya, pihak yang berbeda memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses.
- d. Pemberdayaan Komitmen berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, partisipasi aktif dalam setiap proses kerja menciptakan proses pembelajaran dan pemberdayaan bersama.

Indikator kemauan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menurut (Febrianti, 2020) meliputi:

- a. Motivasi Motivasi diberikan kepada masyarakat agar terdorong atau tergerak untuk ikut andil dalam proses berpartisipasi. Masyarakat diharapkan akan memiliki kemauan yang kuat sehingga terdorong untuk melibatkan diri atau mengikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan.

- b. Tingkat pendidikan Seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi akan memiliki pemahaman tentang kewajibannya untuk berpartisipasi sehingga memiliki kemauan untuk berpartisipasi. Begitu pula sebaliknya, seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memiliki pemahaman tentang kewajibannya untuk berpartisipasi sehingga memiliki kemauan yang rendah untuk berpartisipasi.
- c. Tingkat pendapatan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
- d. Jumlah partisipan Jumlah partisipan menunjukkan tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi di suatu daerah.
- e. Kendala yang dihadapi Kendala yang dihadapi masyarakat berpengaruh pada kemauan masyarakat untuk melakukan partisipasi. Bagaimana pemerintah menangani permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah juga mempengaruhi kemauan partisipasi masyarakat.
- partisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut karakteristiknya, yaitu:
- Orang berpartisipasi dengan menceritakan apa yang terjadi atau terjadi;
  - pengumuman sepihak oleh manajemen proyek atau pelaksana, terlepas dari reaksi masyarakat
  - Orang berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan penelitian, seperti survei atau sejenisnya;

- d. masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses mediasi;
- e. validitas hasil penelitian tidak didiskusikan secara terbuka.

ada beberapa tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. manajemen mengembangkan program pengembangan dan kemudian membentuk dewan penasehat untuk mendukung manajemen.
- b. terapi mengobati atau menyembuhkan penyakit manusia yang disebabkan oleh kesenjangan antara kaya dan miskin, atau oleh ketimpangan kekuasaan dan perbedaan ras yang menjadi penyakit di masyarakat.

ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesiapan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan tergantung pada situasi yang dihadapinya.
- b. Gagasan bahwa pemberdayaan bukan untuk semua orang dan persepsi tokoh masyarakat bahwa pemberdayaan bisa tanpa pamrih.
- c. Ketergantungan adalah budaya di mana orang begitu terbiasa dengan hierarki, birokrasi, dan kontrol administratif yang ketat sehingga apa yang mereka pikirkan dan lakukan menjadi rutinitas.
- d. Mendorong pimpinan masing-masing masyarakat untuk tidak mau menyerahkan kekuasaannya, karena hakekat pemberdayaan adalah menyerahkan sebagian kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.

- e. Pemberdayaan ada batasnya, apalagi dalam siklus pemberdayaan yang relatif panjang dimana di satu sisi kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
- f. Pemimpin gereja mengandalkan pengembangan pemberdayaan gereja.
- g. Konsolidasi tidak mendorong perubahan yang cepat.
- h. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar, baik finansial maupun temporal.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu atau kelompok individu dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, dan memberikan solusi alternatif dengan gagasan, keahlian, waktu, modal, atau materi dalam program pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1. Tingkat pendidikan
2. Tingkat pendapatan
3. Jarak tempat tinggal
4. Tingkat Pekerjaan
5. Penyuluhan

Penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sendiri agar pendapatan dari sektor pajak menjadi lebih optimal maka perlu diadakan penyuluhan dari pemerintah perpajakan.

## 2. Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang secara hukum terutang kepada perseorangan atau badan hukum tanpa ganti rugi segera dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.

Sementara itu, orang pribadi atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, bertanggung jawab atas pajak menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Distribusi yang adil dari dana pembangunan atau warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Distribusi yang adil dari dana pembangunan atau warga negara. Misalnya, jika membayar pajak jalan, dapat menggunakan atau menikmati keuntungan pembangunan jalan. Hampir semua bank dan kantor pos swasta dan milik negara tidak akan lagi memungut pembayaran pajak manual atau kertas mulai 31 Desember 2015. Mulai 1 Januari 2016, pembayaran pajak dilakukan secara online melalui invoice online sehingga lebih mudah dan tidak memakan waktu.

Berikut adalah beberapa manfaat pajak umum:

- a. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, mulai dari pengeluaran pribadi hingga pembiayaan berbagai proyek
- b. Uang Wajib Pajak digunakan untuk membiayai agar menciptakan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat.
- c. Pajak menopang barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat

- d. Pembayaran utang negara di luar negeri.
- e. Pajak membantu usaha kecil, dan menengah (UKM) dengan pelatihan dan penggalangan modal.
- f. Dukungan terhadap pekerjaan Direksi

Menurut (Mardiasmo., 2018), aplikasi sistem pemungutan pajak bisa dibedakan sebagai 3 sistem. Berikut merupakan 3 implementasi menurut sistem pemungutan pajak.

- a. Sistem klasifikasi resmi

Sistem perpajakan formal adalah penerapan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (bendahara) untuk menetapkan besarnya pajak bagi setiap wajib pajak.

- b. Sistem Penilaian Diri

*Self Assesment System* adalah penerapan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada setiap Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

- c. Dengan sistem tetap

Sistem kepemilikan mengacu pada penerapan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Dalam pengertian ini, pihak ketiga bukanlah otoritas pajak atau pembayar pajak.

### **3.Fungsi pajak**

Fungsi regulasi tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk mengekang inflasi.

- b. Pajak dapat dijadikan alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- c. Misalnya, pajak dapat memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- e. Pajak dapat digunakan untuk mengatur dan menarik investasi modal, yang membantu perekonomian menghasilkan lebih banyak.

Fungsi pemerataan atau pendistribusian

Pemerintah juga menggunakan pajak untuk mendistribusikan kesejahteraan melalui transfer tunai, asuransi kesehatan, dan layanan publik. Menstabilkan fungsi Ketika terjadi deflasi, pemerintah menaikkan jumlah uang tersebar. Dengan pajak yang tinggi maka aliran uang bisa dikurangi sebagai akibatnya terjadi inflasi. Di sisi lain, pemerintah memotong pajak buat menaikkan jumlah uang tersebar dan melawan deflasi.

Tanggung jawab membayar pajak terletak pada anggota masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, berdasarkan sistem *self assessment* yang diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, direktur jenderal pajak (DJP) berupaya melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, sesuai dengan visi dan misinya.

#### **4. Jenis Pajak**

Ada berbagai jenis pajak yang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, jenis dan badan pemungutan.

Tergantung pada kelompoknya, pajak dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Pajak langsung, Pajak yang dibayar atau terutang oleh wajib pajak dan tidak dikenakan atau dipungut oleh orang lain atau pihak ketiga manapun.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dasar pengenaan pajak jenis ini adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah.wajib pajak mengetahui informasi besaran pajak setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).wajib pajak dalam pajak PBB terdiri dari dua,yaitu orang pribadi dan badan.selain itu juga memiliki dan menguasai bangunan dan tau mendapatkan manfaat dari bangunan.perlu di ketahui tidak semua jenis tanah dan bangunan dapat dikenakan pajak PBB.pajak PBB termasuk dalam kategori pajak pusat serta harus dilunasi paling lambat enam bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Tentukan apakah pajak bersifat langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomi dengan mempertimbangkan tiga faktor yang terkait dengan kewajiban pajak. Ketiga unsur tersebut terdiri dari:

1. Orang-orang yang bertanggung jawab dari banyak orang diwajibkan secara hukum untuk membayar pajak;
2. Wajib Pajak adalah orang yang sesungguhnya menanggung beban pajak di muka;
3. Wajib Pajak bertanggung jawab secara hukum atas pajak. Apabila ketiga unsur tersebut ada pada satu orang, maka pajak tersebut disebut pajak langsung, tetapi apabila ketiga unsur tersebut terjadi

secara terpisah atau pada lebih dari satu orang, maka pajak tersebut disebut pajak tidak langsung.

Tentu saja, pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perpajakan subjektif dihitung dengan mempertimbangkan pribadi atau keadaan wajib pajak.
2. Pajak dalam bentuk natura, yaitu pajak yang subjeknya dapat dibuktikan sebagai objek, keadaan, tindakan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan.

Menurut otoritas pajak, pajak dibagi menjadi dua bagian:

1. Pajak negara (pajak pusat), pajak negara, biasanya digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah kota baik di Daerah Tingkat I (Pajak Kota) maupun Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai APBD sendiri.

### **5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak ini bersifat material, artinya besarnya tergantung pada keadaan tanah atau bangunan yang bersangkutan. Pajak rumah dan bangunan pada dasarnya adalah pajak substantif. Tanah dan/atau bangunan.

Contoh objek tanah:

- a. Sawah.
- b. Peternakan.
- c. kebun.
- d. Sawah.
- e. Halaman.
- f. tambang.

Contoh objek bangunan:

- a. Bangunan tempat tinggal.
- b. Bangunan komersial.
- c. Gedung bertingkat.
- d. Pusat Bisnis.
- e. Pagar yang indah.
- f. Kolam renang.
- g. Metode Pembayaran.

Subyek adalah individu dan organisasi yang benar-benar memiliki:

- a. Hak Tanah.
- b. Pengguna tanah.
- c. Pemiliki gedung.
- f. Mendapatkan Manfaat Konstruksi..

Properti kena pajak harus memenuhi kriteria tertentu yang tercantum untuk tanah dan bangunan yang dikecualikan dari pajak properti dan bangunan:

- a. Tanah atau bangunan yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan amal di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya populer - bukan untuk mencari keuntungan.
- b. Tempat tanah atau bangunan yang dijadikan kuburan, jenazah atau benda sejenis.
- c. Hutan lindung terdiri dari bangunan, hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, padang rumput yang dikuasai desa dan tanah negara yang tidak tercemar.

- d. tanah atau bangunan yang dibagikan oleh perwakilan diplomatik, penasihat.
- e. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh organisasi internasional atau perwakilan organisasi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### Hukum pajak properti dan konstruksi

Pembayaran PBB didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994 yang mengubah UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah pada tahun 2009, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) di sektor pedesaan dan perkotaan dilimpahkan kepada pemerintah daerah/kota. Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan (PBB P3) tetap berada di bawah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pembayaran pajak bumi dan bangunan Cara mendaftarkan objek pajak real estat dan bangunan Hak dan kewajiban wajib pajak pada saat mendaftarkan objek kena pajak

Jika Anda mengelola atau mendaftarkan objek kontrol di Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Anda memiliki hak sebagai berikut:

1. Dapatkan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara gratis dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau instansi pemerintah lainnya.
2. Dapatkan pernyataan, informasi tentang cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkannya ke Kertas

Kerja Pemeriksaan (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat.

3. Dapatkan tanda terima pengembalian (SPOP) dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat.
4. Perbaiki atau tambahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) jika terjadi kesalahan saat mengunduh. Namun, dengan koreksi ini juga harus dilampirkan salinan dokumen identitas kepemilikan yang masih berlaku, sertifikat pembelian dan penjualan real estat, dll.
5. berhak mengangkat orang lain sebagai pegawai Direktur Jendral Pajak (DJP), dengan ketentuan Wajib Pajak disertai surat kuasa untuk melengkapi dan menandatangani Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan materai.
6. Mengirimkan permintaan tertulis untuk menunda pengiriman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sampai dengan batas waktu, dengan alasan.

Kewajiban wajib pajak pada saat mendaftarkan pos pajak melalui Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) adalah:

1. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan harus melaporkan Barang Kena Pajak dengan melengkapi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
2. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan harus melaporkan Barang Kena Pajak dengan melengkapi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

3. Pengisian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus jelas, akurat dan lengkap.
4. Kirim atau poskan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah diisi ke gratis dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat paling lambat 30 hari setelah menerima formulir SPOP.

Apabila terjadi perubahan informasi, wajib menginformasikan kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat mengenai perubahan informasi tersebut dengan mengisi kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk memperbaiki SPOP yang sebelumnya salah dengan menambahkan beberapa dokumen.

1. Pajak properti dan bangunan dasar
2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata atau harga pasar dalam transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini yang menjadi objek pajak adalah tanah dan bangunan. Setiap tahun, Sekretaris Perbendaharaan, mendengarkan pandangan gubernur/walikota, biasanya menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor seperti:

Dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- a. Material yang digunakan pada bangunan.
- b. penyalahgunaan.
- c. Lokasi
- d. dan keadaan lingkungan

Selain itu, perlu ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) meskipun tidak ada usaha Dengan menggunakan instance objek lain dengan kondisi ini, yang kurang lebih dapat mendekati nilai objek referensi.

Nilai akuisisi baru Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru dengan menentukan harga perolehan barang kena pajak. Proposisi Penjualan Alternatif Nilai penggantian yang dilaporkan merupakan penetapan NJOP berdasarkan penerimaan pajak keluaran. Oleh karena itu, harga jualnya didasarkan pada penghasilan kena pajak dari barang itu sendiri.

Nilai eceran barang kena pajak tidak dikenakan pajak Jumlah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) aktual bervariasi menurut wilayah.

Namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000, besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan paling banyak sebesar 12.000.000 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.:

1. Setiap wajib pajak menerima pengurangan (NJOPTKP) satu kali dalam satu tahun pajak.
2. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu *tax haven*. *Tax haven* yaitu negara yang menawarkan pajak rendah bahkan tanpa pemungutan pajak kepada perusahaan atau individu, maka hanya Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) yang paling berharga yang dapat menerima atau menerima potongan dari Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan tidak dapat digabungkan dengan Wajib Pajak lainnya.

### Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) menjadi dasar penghitungan PBB. NJKP disebut juga dengan ukuran atau nilai eceran barang yang dimasukkan dalam perhitungan pajak yang terutang. Artinya NJKP merupakan bagian dari NJOP.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 201/KMK.04/2000 menyatakan bahwa persentase NJKP ditentukan oleh pemerintah. Berikut detailnya:

- a. Tarif dasar adalah 40%.
- b. Pajak pertambahan adalah 40%.
- c. Pajak hutan adalah 40%.
- d. Yurisdiksi pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan ditunjukkan dengan nilai NJOP-nya, yaitu:
  1. Jika  $NJOP > Rp1.000.000.000,00$  maka persentase NJKP adalah 40%.
  2. Jika  $NJOP < Rp1.000.000.000,00$  maka persentase NJKP adalah 20%.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arta (2016)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015	Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2011 (58.44%), tahun 2012 (54.23%), tahun 2013 (49.22%), tahun 2014 (42.14%) dan pada tahun 2015 (32.04%).
2.	Sopana, dkk (2016)	Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah dan Sanksi Administrasi	berarti dapat diketahui bahwa pengaruh variabel tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi berpengaruh sebesar 37,0% terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan sebesar 63,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

3.	Kulub, (2022)	<p>Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang</p>	<p>penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari Kota Malang pada tahun 2019. Kelurahan Dinoyo sebesar 75,9% memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam membayar PBB daripada Kelurahan Merjosari yang hanya mencapai 66,6% pada tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB adalah kualitas pelayanan petugas pembayaran PBB, dan sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam membayar PBB. Adapun tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan. Terdapat dampak yang terjadi apabila tidak membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya, sanksi hingga hukuman penjara dan menyebabkan defisit anggaran.</p>
----	---------------	--	--

4.	Pasaribu et al., (2017)	"Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi	membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino belum optimal. faktor yang menghambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dimana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak ini tidak berjalan dengan efektif. Wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Karena, dengan membayar pajak dengan rutin wajib pajak berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya khususnya untuk Kota Jambi. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino belum baik karena tingkat komunikasi, sikap petugas Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran, pendidikan, dan tanggung jawab belum optimal.
5.	Prisma Anugerah, (2016)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak	penghambatnya adalah kurangnya kesadaran atau tanggung jawab di masyarakat karena banyak faktor

		<p>Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Palaran Kota Samarinda</p>	<p>seperti:Pemerintah daerah selalu terlambat atau sering lalai membayar pajak bumi dan bangunan, yang berujung pada konsekuensi pajak jika masyarakat tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak, bagaimana atau kapan, mereka masih belum memahami pentingnya membayar pajak secara rutin setiap tahun untuk mendukung pembangunan daerah.</p>
6.	<p>Nurhayati, Nofrianty, (2019)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Reklame (Studi Empiris Di Kabupaten Rokan Hulu)</p>	<p>menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Reklame. adapun hasil penelitian kesadaran perpajakan sebesar thitung 5,516 &lt; ttabel 2,02619 dengan hasil bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan, dengan hasil kesadaran wajib pajak reklame sudah terealisasi di Kabupaten Rokan Hulu, Persepsi wajib pajak sebesar Nilai thitung persepsi wajib pajak sebesar 2,600 &gt; ttabel 2,16037 berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan dengan hasil persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil nilai Fhitung &gt;</p>

			<p>Ftabel (<math>19,181 &gt; 3,24</math>), dengan hasil variabel kesadaran dan persepsi wajib pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel keberhasilan penerimaan pajak reklame.</p>
7.	<p>Julia Filia Kolatung, (2020)</p>	<p>Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado</p>	<p>tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kota Manado setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak PBB semakin meningkat karena sebagian besar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih baik maju dan</p>

			berkembang.
8.	Mira Andriani, (2018)	Partisipasi Masyarakat pada Membayar Pajak Bumi & Bangunan pada Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar	memperlihatkan kesediaan membayar pajak bumi & bangunan buat mencapai partisipasi yg berkeadilan. Kebanyakan orang peka terhadap pembayaran pajak properti & bangunan, namun sebagian mini bahkan kurang peka, terutama pemilik tanah.
9.	Yusriani Yuliani, (2018)	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	rendahnya partisipasi masyarakat kecamatan Inuman dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi pemerintah kota dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian tentang partisipasi kotamadya dalam pembayaran pajak properti dan bangunan masih langka, karena otoritas pajak belum menyarankan warga negara untuk memoderasi partisipasi mereka dalam pembayaran pajak.
10.	Miranti Indah Pertiwi, (2020)	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam	partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di

		<p>Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Hasil</p>	<p>Kecamatan Seberida dari indikator tingkat pendidikan tergolong kurang baik dengan presentase 39%, tingkat pendapatan tergolong cukup baik dengan presentase 48%, jarak tempat tinggal tergolong cukup baik dengan presentase 40%, tingkat pekerjaan tergolong kurang baik dengan presentase 33,33%, dan penyuluhan tergolong cukup baik dengan presentase 44%. Saran penulis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan penghargaan untuk masyarakat yang taat dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, aktif melakukan penyuluhan setiap tahunnya, dan lebih diterapkan lagi untuk menggunakan bukti lunas membayar pajak dalam mengurus segala administrasi di kantor desa.</p>
--	--	--	---

### **C.Kerangka Pikir Penelitian**

Pajak bumi dan bangunan diatur oleh undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang kemudian diberikan sebagian kewenangan pemerintah daerah pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan keputusan ini, pemerintah daerah dapat sepenuhnya mengelola hasil penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hasil yang terlihat penerimaan PBB sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah tiap tahunnya, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak.

Namun, selama ini partisipasi masyarakat tidak selalu stabil. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal serta penyuluhan yang pernah dilaksanakan. Sehingga dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut pemerintah desa tibona kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba dapat melakukan upaya yang tepat dalam mengatasi persoalan wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

#### **D.Hipotesis Penelitian**

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengeumpulan data.

Berdasarkan kerangka pikir yang dijelaskan diatas, maka hipotesis yang dirangkum, yaitu:

**“Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Kurang dari 65% dengan tingkat ideal 100%”.**

H<sub>1</sub>: Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba < 65%

H<sub>2</sub>: Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba > 60%



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

#### **B. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. Dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan 20 Juni 2023.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, jumlah wajib pajak bumi dan bangunan berjumlah 3.310 jiwa.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 jiwa. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = + \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : nilai kritis (ketelitian) yang digunakan

Berdasarkan rumus pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka jumlah sampel wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{3.310}{1 + 3.383.0,1^2}$$

$$n = \frac{3.310}{1 + 3.310.0,01}$$

$$n = \frac{3.310}{34,83}$$

$n = 94,033$  dibulatkan menjadi 95

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

terkait penelitian ini banyak sekali bahan yang melengkapi pengumpulan data ini melalui metode berikut:

1. melakukan observasi, metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap masyarakat dan dapat memberikan gambaran langsung tentang partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.
2. Kuesioner, pembagian kuesioner kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa besar partisipasi mereka dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

#### **E. Teknik Analisis**

Metode analisis adalah upaya untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam sebuah bentuk sehingga mudah dipahami. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data kuantitatif deskriptif, dengan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat sebuah kesimpulan yang mengarah secara umum dan generalisasi.

Sangat baik : 80-100%

Baik : 70-80%

Cukup: 60-70%

Kurang : 50-60%

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Karakteristik lokasi penelitian

Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Tibona memiliki luas wilayah sekitar 17,21 km<sup>2</sup> dan pada tahun 2021, jumlah penduduk desa Tibona sekitar 2.144 jiwa terdiri dari 1.041 laki-laki dan 1.103 perempuan. Desa Tibona berbatasan dengan beberapa desa lain disekitarnya yaitu:

- a. Desa Tombo Bulu disebelah utara.
- b. Desa Payangkalang disebelah barat.
- c. Desa Sanjaiyan disebelah selatan.
- d. Desa Lili Lilau sebelah timur.

Mayoritas penduduk desa Tibona bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun terdapat pula beberapa penduduk yang bekerja disektor perdagangan dan jasa. Penduduk desa Tibona sebagian besar beragama islam . ada juga beberapa fasilitas umum dibidang kesehatan seperti posyandu, puskesmas san poliklinik, dibidang pendidikan seperti beberapa sekolah dasar dan menengah, serta beberapa lembaga pendidikan non-formal seperti TPA (taman pendidikan al-quran) dan TQA (taman quran anak-anak).

##### 2. Visi dan Misi

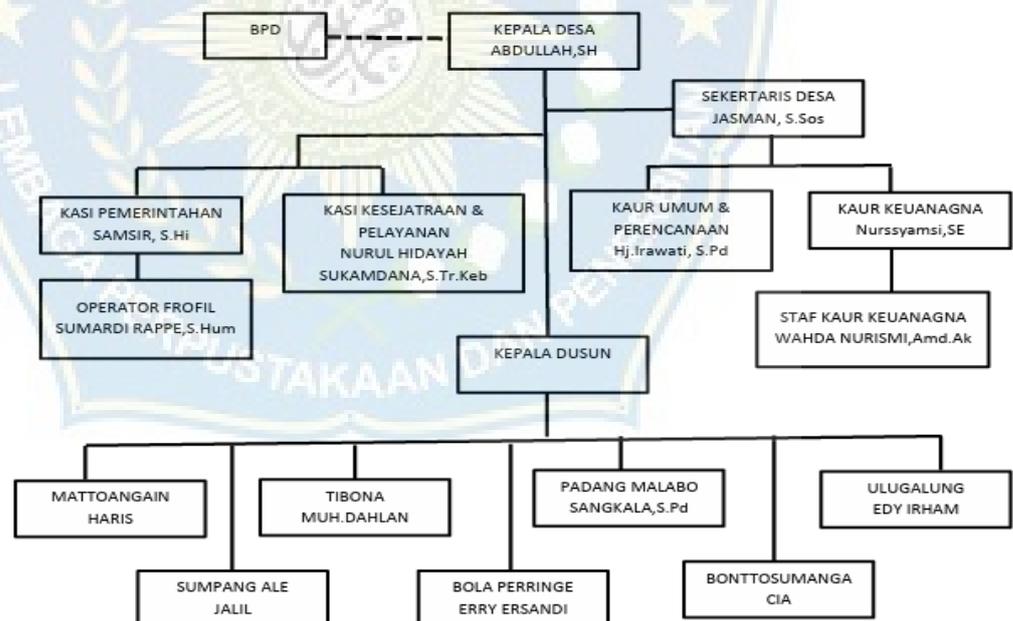
Adapun visi Desa Tibona, sebagai berikut

“Bersama Melanjutkan Pengembangan Desa Tibona Yang Agamis Sebagai Daerah Agraris Dengan Mengutamakan Kearifan Lokal dan Gotong Royong Menuju Tibona Yang Berdaya Saing”

Dalam meraih visi Desa Tibona seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Tibona diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Desa Tibona.
- b. Menciptakan suasana aman, damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Tibona.

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**

## B. Deskripsi Data

### 1. Identitas responden

Identitas responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel acak wilayah (*Area Probability Sampling*). Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin, dan diperoleh sampel sebanyak 95 responden.

**Tabel 4.1**  
**Identitas responden berdasarkan jenis kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	49	51,6 %
Perempuan	46	48,4 %
jumlah	95	100 %

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat diketahui jumlah responden sebanyak 95 orang, terdiri dari 49 laki-laki dan 46 perempuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi wajib pajak adalah mayoritas laki-laki daripada perempuan.

### 2. Kelempok umur

Identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari.

Kematangan pola pikir dalam usia seorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai sistem

dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat umur responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**

**Identitas Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
26-33	7	7,4 %
33-40	25	26,3 %
40-47	28	29,5 %
47-54	22	23,2 %
54-61	11	11,6 %
61-64	1	1,1 %
68-70	1	1,1 %
Jumlah	95	100 %

*Sumber: Hasil Penelitian, 2023*

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa responden memiliki usia yang bervariasi. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa persentase terbesar responden berada di rentang usia 40-48 tahun sebesar 29,5 %.

### 3. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya. Pekerjaan erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi dan akan menentukan perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jelas jenis pekerjaan responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Identitas responden berdasarkan pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Ibu Rumah Tangga	25	26,3 %
Karyawan Swasta	7	7,4 %
Pedagang	2	2,1 %
Petani	22	23,2 %
Wirausaha	4	4,2 %
PNS	4	4,2 %
Anggota BPD	3	3,2 %
pensiunan	1	1,1 %
ASN	6	6,3 %
Pengusaha	10	10,5 %
Kepala Desa	1	1,1 %
Kepala Dusun	1	1,1 %
Staf Kantor Desa	1	1,1 %
Tenaga Knttrak	1	1,1 %
Karyawan honorer	7	7,4 %
Jumlah	95	100 %

*Sumber: Hasil Peneitian,2023*

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pekerjaan yang bervariasi. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa persentase terbesar pekerjaan responden adalah Ibu Rumah Tangga sebesar 26,3 %.

### **C. Analisis Data**

Jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif deskriptif, maka data tidak hanya berbentuk pernyataan dari hasil penyebaran kuesioner, melainkan juga dari hasil yang berbentuk angka yang diolah. Pertanyaan berjumlah 13 dengan pilihan jawaban “sangat setuju” bernilai 4, “setuju” bernilai 3, “tidak setuju” bernilai 2, “tidak setuju” bernilai 1. Dengan asumsi semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesioner, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Peneliti menguraikan dalam bentuk tabel disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden melalui penyebaran kuesioner.

**Tabel 4.4****Tanggapan Responden Tentang Membayar PBB**

Sangat Setuju	63	66,3 %
Setuju	31	32,6 %
Tidak Setuju	0	0 %
Sangat Tidak Setuju	1	1,1 %

*Sumber: Hasil Penelitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 66,3 %, yang menjawab setuju sebanyak 32,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan selama ini sudah sangat baik. Terhadap responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1,1 % menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju karena kurangnya pengetahuan tentang pajak, rendahnya partisipasi masyarakat tentang pajak.

**Tabel 4.5****Tanggapan Responden Tentang Membayar PBB Tepat Waktu**

Sangat Setuju	39	41,1 %
Setuju	56	58,9 %
Tidak Setuju	0	0 %
Sangat Tidak Setuju	0	0 %

*Sumber: Hasil Penelitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 41,1 %, yang menjawab setuju sebanyak 58,9 %.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu selama ini sudah sangat baik.

**Tabel 4.6**

**Tanggapan Responden Tentang Memiliki Kewajiban Membayar Pajak**

Sangat Setuju	44	46,3 %
Setuju	51	46,3 %
Tidak Setuju	0	0 %
Sangat Tidak Setuju	0	0 %

*Sumber: Hasil Peneitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 46,3 %, yang menjawab setuju sebanyak 46,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak selama ini sudah sangat baik.

**Tabel 4.7**

**Tanggapan Responden Yang Mengetahui Dan Paham Tentang PBB Yang Harus Dibayar**

Sangat Setuju	45	47,4 %
Setuju	50	52,6 %
Tidak Setuju	0	0 %
Sangat Tidak Setuju	0	0 %

*Sumber: Hasil Peneitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 47,4 %, yang menjawab setuju sebanyak 52,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengetahui dan paham

tentang pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar selama ini sudah sangat baik.

**Tabel 4.8**

**Tanggapan Responden Tentang Penghasilan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak**

Sangat Setuju	49	51,6 %
Setuju	45	47,4 %
Tidak Setuju	0	0 %
Sangat Tidak Setuju	1	1,1 %

*Sumber: Hasil Penelitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 51,6 %, yang menjawab setuju sebanyak 47,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak selama ini sudah sangat baik. Terhadap responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1,1 % menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah.

**Tabel 4.9**

**Tanggapan Responden Tentang besarnya PBB Sesuai dengan Pendapatan**

Sangat Setuju	38	40,0 %
Setuju	56	58,9 %
Tidak Setuju	0	0 %
Sangat Tidak Setuju	1	1,1 %

*Sumber: Hasil Penelitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 40,0 %, yang menjawab setuju sebanyak 58,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pajak bumi dan bangunan sesuai dengan pendapatan selama ini sudah sangat baik. Terhadap responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1,1 % menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

**Tabel 4.10**  
**Tanggapan Responden Tentang Jarak Tempat Tinggal Membuat**  
**Masyarakat Malas Membayar Pajak**

Sangat Setuju	2	2,1 %
Setuju	7	7,4 %
Tidak Setuju	52	54,7 %
Sangat Tidak Setuju	34	35,8 %

*Sumber: Hasil Penelitian, 2023*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2,1 %, yang menjawab setuju sebanyak 7,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal tidak mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari jawaban responden yang hanya sebesar 9,5 %. Terhadap responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 54,7 % , yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 35,8 % ini menunjukkan masyarakat tidak setuju bahwa jarak tempat tinggal dapat mempengaruhi untuk membayar pajak.

Tabel 4.11

**Tanggapan Responden Tentang Tempat Pembayaran Pajak Yang Sulit  
Dijangkau**

Sangat Setuju	0	0 %
Setuju	6	6,3 %
Tidak Setuju	53	55,8 %
Sangat Tidak Setuju	36	37,9 %

Sumber: Hasil Peneitian,2023

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 6,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa tempat pembayaran pajak tidak mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari jawaban responden yang setuju hanya sebesar 6,3 %. Terhadap responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 55,8 % , yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 37,9 % ini menunjukkan masyarakat tidak setuju bahwa tempat pembayaran pajak dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak.

Tabel 4.12

**Tanggapan Responden Tentang Besaran Penghasilan Wajib Pajak Maka  
Semakin Besar Jumlah Pajak Terhutang Dibayarkan.**

Sangat Setuju	35	36,8 %
Setuju	58	61,1 %
Tidak Setuju	1	1,1 %
Sangat Tidak Setuju	1	1,1 %

Sumber: Hasil Peneitian,2023

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 36,8 %, yang menjawab setuju sebanyak 61,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan selama ini sudah sangat baik. Terhadap responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1,1 %, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1,1 % menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

**Tabel 4.13**

**Tanggapan Responden Tentang Pekerjaan Memudahkan Membayar PBB**

Sangat Setuju	25	26,3 %
Setuju	70	73,7 %
Tidak Setuju	0	0 %
Sangat Tidak Setuju	0	0 %

*Sumber: Hasil Peneitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 26,3 %, yang menjawab setuju sebanyak 73,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 4.14

**Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Peraturan Pajak Diperoleh dari Sosialisasi**

Sangat Setuju	19	20,0 %
Setuju	49	51,6 %
Tidak Setuju	27	28,4 %
Sangat Tidak Setuju	0	0 %

Sumber: Hasil Penelitian,2023

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20,0 %, yang menjawab setuju sebanyak 51,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah baik. Terhadap responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 28,4 %, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 % menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, hal ini terbukti masih ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang pajak.

Tabel 4.15

**Tanggapan Responden Tentang Sistem Pajak yang Mudah Dipahami**

Sangat Setuju	23	24,2 %
Setuju	70	73,7 %
Tidak Setuju	2	2,1 %
Sangat Tidak Setuju	0	0 %

Sumber: Hasil Penelitian,2023

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 24,2 %, yang menjawab setuju sebanyak 73,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pajak yang berlaku mudah dipahami sangat sudah baik. Terhadap responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1 %, menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, hal ini terbukti masih ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang pajak.

**Tabel 4.16**

**Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan yang Diberikan oleh Petugas**

**Pajak**

Sangat Setuju	10	10,5 %
Setuju	40	42,1 %
Tidak Setuju	45	47,4 %
Sangat Tidak Setuju	0	0 %

*Sumber: Hasil Peneitian,2023*

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 10,5 %, yang menjawab setuju sebanyak 42,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pajak memberikan penyuluhan yang jelas dapat dikatakan sudah baik. Terhadap responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 47,4 %, menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, hal ini terbukti masih ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang pajak.

#### D. Pengujian Hipotesis

Peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

“Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Kurang dari 65% dengan tingkat ideal 100%”.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian, peneliti menggunakan t-test satu sampel. Adapun perhitungan pengujian hipotesis sebagai berikut.

Kriteria skor berdasarkan pada skala likert berdasarkan data yang ada terdapat 95 responden, ditemukan jumlah data sebagai berikut:

Jumlah sampel : 95 responden

Jumlah pertanyaan : 13

- a. Responden yang menjawab sangat setuju (skor 4) berjumlah 392 responden.
- b. Responden yang menjawab setuju (skor 3) berjumlah 589 responden
- c. Responden yang menjawab tidak setuju (skor 2) berjumlah 180 responden
- d. Responden yang menjawab sangat tidak setuju (skor 1) berjumlah 74 responden

Rumus  $T \times P_n$

T : total jumlah responden yang memilih

Pn : pilihan angka skor likert

a. Responden yang menjawab sangat setuju (skor 4) =  $392 \times 4 = 1.568$

b. Responden yang menjawab setuju (skor 3) =  $589 \times 3 = 1.761$

c. Responden yang menjawab tidak setuju (skor 2) =  $180 \times 2 = 360$

d. Responden yang menjawab sangat tidak setuju (skor 1) =  $74 \times 1 = 74$

Interpensi skor perhitungan

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden

$$= 4 \times 95 \times 13$$

$$= 4.940$$

X = skor terendah likert x jumlah responden

$$= 1 \times 95 \times 13$$

$$= 1.235$$

Penyelesain akhir

Rumus indeks % = total skor / Y X 100

$$= 3.763 / 4.940 \times 100$$

$$= 76.17 \%$$

Harga  $t_{hitung}$  selanjutnya dibandingkan dengan harga  $t_{tabel}$  dengan derajat kebebasan  $(dk) = n - 1 = 95 - 1 = 74$  dan taraf kesalah  $\alpha = 10\%$  untuk uji satu pihak kiri karena harga  $t_{hitung}$  lebih besar dari harga  $t_{tabel}$  atau  $H_0$  ( $76,17 > 1.235$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## E. Pembahasan

Menentukan skor ideal dan menghitung skor hasil penelitian. Skor ideal adalah  $4 \times 95 \times 13 = 4.940$ . (4 = nilai tertinggi setiap pilihan pertanyaan yang diajukan responden, 95 = jumlah sampel yang diajukan dalam penelitian, 13 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jika skor keseluruhan hasil penelitian dibagi dengan skor ideal maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah  $3.769 : 4.940 \times 100 \% = 76,17 \%$  dan berdasarkan pada kriteria skor sudah baik, jadi rumusan masalah yang pertama bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dinilai baik oleh masyarakat karena diperoleh hasil sebesar 76,17%.

Rumusan masalah yang kedua dapat dijawab bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tibona adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai wajib pajak kepada masyarakat sebagai wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Minimnya pendapatan masyarakat ini dapat dilihat dari status pekerjaan mereka yang hanya ibu rumah tangga dan petani, pendapatan petani tidak tetap setiap bulannya karena mereka bukan pegawai tetap, akan tetapi rata-rata pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

## **F. Kesesuaian Dengan Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Julia Filia Kolatung, 2020) tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado penelitian dilakukan dengan metode analisis kualitatif hasilnya diketahui bahwa Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kota Manado setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak PBB semakin meningkat karena sebagian besar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih baik maju dan berkembang.

Penelitiannya lainnya juga dilakukan oleh (Miranti Indah Pertiwi, 2020) dari indikator tingkat pendidikan tergolong kurang baik dengan presentase 39%, tingkat pendapatan tergolong cukup baik dengan presentase 48%, jarak tempat tinggal tergolong cukup baik dengan presentase 40%, tingkat pekerjaan tergolong kurang baik dengan presentase 33,33%, dan penyuluhan tergolong cukup baik dengan presentase 44%. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan penghargaan untuk masyarakat yang taat dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, aktif melakukan penyuluhan setiap tahunnya, dan lebih diterapkan lagi untuk menggunakan bukti lunas membayar pajak dalam mengurus segala administrasi di kantor desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan sudah cukup baik karena mencapai 76.17 %. Adapun beberapa faktor-faktor yang terdapat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai petugas pajak, sistem perpajakan, dan minimnya pendapatan masyarakat sebagai wajib pajak.

#### **B. SARAN**

1. Pemerintah sebagai petugas pajak dapat menjadwalkan lagi sosialisasi-sosialisasi tentang pemahaman dan pengetahuan tentang sistem pajak bumi dan bangunan serta mengsosialisasikan cara pembayaran pajak secara online.
2. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat ditingkatkan lagi. agar masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (pbb) Dikelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar*. Academia.
- Andriani, M. (2018). *Partisipasi Masyarakat pada Membayar Pajak Bumi & Bangunan pada Desa Karangpanimbali Kecamatan Purwaharja Kota Banjar*. 1.
- Anugerah, P. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Palaran Kota Samarinda*. 4.
- Arta. (2016). *judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan (PBB) pada Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015*. 1.
- Febrianti. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak*.
- Handayani. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dedsa*.
- Kolatung, J. F. (2020). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado*. 9(2).
- Kulub, E. T. M. I. (2022). *Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakam*. Andi.
- Nurhayati, Nofrianty, A. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Reklame (Studi Empiris Di Kabupaten Rokan Hulu)*. 1(2), 6.
- Pasaribu, P. I., Tampi, G. B., & D.pombengi, J. (2017). *Partisipasi Masyarakat*

*Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tempin Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi.*

Pertiwi, M. I. (2020). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.*

Sopana, R. W., Suharno, & Kristianto, D. (2016). *Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah dan Sanksi Administrasi.* 12(4).

Yuliani, N. Y. (2018). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singing.* 87–93.





# LAMPIRAN

## LEMBAR KUESIONER

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN DI DESA TIBONA KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN  
BULUKUMBA

- a. Bacalah pertanyaan dengan teliti .
- b. Untuk mengisi setiap pertanyaan yang terlampir dengan memberikan tanda centang (  $\checkmark$  ) pada setiap pertanyaan yang anda anggap sesuai dengan pilihan anda.
- c. Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu.

### 2. Profil responden:

- a. Nama:
- b. Umur:
- c. Jenis kelamin:
- d. Pekerjaan:

### 3. Keterangan:

- a. SS : Sangat Setuju (4)
- b. S : Setuju (3)
- c. TS : Tidak Setuju (2)
- d. STS : Sangat Tidak Setuju (1)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)				

2.	Saya membayar PBB tepat waktu				
3.	Saya merasa memiliki kewajiban membayar pajak				
4.	Saya mengetahui dan paham tentang PBB yang harus dibayar				
5.	Penghasilan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak				
6.	Besarnya PBB sesuai dengan pendapatan				
7.	Jarak tempat tinggal yang jauh membuat masyarakat malas membayar pajak				
8.	Tempat pembayaran pajak yang sulit dijangkau				
9.	Semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan				
10.	Pekerjaan saya memudahkan untuk membayar PBB				
11.	Pemahaman dan pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah				
12.	Sistem pajak yang berlaku mudah dipahami				
13.	Petugas pajak memberikan penyuluhan dengan jelas				

**LEMBAR KUESIONER**

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIBONA KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA

a. Bacalah pertanyaan dengan teliti .  
 b. Untuk mengisi setiap pertanyaan yang tertampir dengan memberikan tanda centang ( ✓ ) pada setiap pertanyaan yang anda anggap sesuai dengan pilihan anda.  
 c. Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu.

2. Profil responden:

a. Nama: JALIL  
 b. Umur: 46 THN  
 c. Jenis kelamin: LAKI-LAKI  
 d. Pekerjaan: KADIS

3. Keterangan:

a. SS : Sangat Setuju  
 b. S : Setuju  
 c. TS : Tidak Setuju  
 d. STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)	✓			

2.	Saya membayar PBB tepat waktu	✓			
3.	Saya merasa memiliki kewajiban membayar pajak		✓		
4.	Saya mengetahui dan paham tentang PBB yang harus dibayar	✓			
5.	Penghasilan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak		✓		
6.	Besarnya PBB sesuai dengan pendapatan	✓			
7.	Jarak tempat tinggal yang jauh membuat masyarakat malas membayar pajak	✓			
8.	Tempat pembayaran pajak yang sulit dijangkau	✓			
9.	Semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan	✓			
10.	Pekerjaan saya memudahkan untuk membayar PBB	✓			
11.	Penahaman dan pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah		✓		
12.	Sistem pajak yang berlaku mudah dipahami	✓			
13.	Pelugas pajak memberikan penyuluhan dengan jelas	✓			



**LEMBAR KUESIONER**

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIBONA KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA

a. Bacalah pertanyaan dengan teliti.

b. Untuk mengisi setiap pertanyaan yang terlampir dengan memberikan tanda centang ( ✓ ) pada setiap pertanyaan yang anda anggap sesuai dengan pilihan anda.

c. Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu.

2. Profil responden:

a. Nama: *ABDULLAH SH*

b. Umur: *53*

c. Jenis kelamin: *Laki - Laki*

d. Pekerjaan: *KADES*

3. Keterangan:

a. SS : Sangat Sesuai

b. S : Sesuai

c. TS : Tidak Sesuai

d. STS : Sangat Tidak Sesuai

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)	✓			

2.	Saya membayar PBB tepat waktu	✓			
3.	Saya merasa memiliki kewajiban membayar pajak	✓			
4.	Saya mengetahui dan paham tentang PBB yang harus dibayar	✓			
5.	Penghasilan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak	✓			
6.	Besarnya PBB sesuai dengan pendapatan	✓			
7.	Jarak tempat tinggal yang jauh membuat masyarakat malas membayar pajak				✓
8.	Tempat pembayaran pajak yang sulit dijangkau				✓
9.	Semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan	✓			
10.	Pekerjaan saya memudahkan untuk membayar PBB	✓			
11.	Pemahaman dan pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah	✓			
12.	Sistem pajak yang berlaku mudah dipahami	✓			
13.	Petugas pajak memberikan penyuluhan dengan jelas				✓



**LEMBAR KUESIONER**

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIBONA KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA

a. Bacalah pertanyaan dengan teliti  
b. Untuk mengisi setiap pertanyaan yang terlampir dengan memberikan tanda centang ( ✓ ) pada setiap pertanyaan yang anda anggap sesuai dengan pilihan anda.  
c. Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu.

**2. Profil responden:**

a. Nama: **NURUL HIYAH SIKAMDANA**  
b. Umur: **30 TAHUN**  
c. Jenis kelamin: **PEREMPUAN**  
d. Pekerjaan: **STAF KANTOR DESA**

**3. Keterangan:**

a. SS: Sangat Setuju  
b. S: Setuju  
c. TS: Tidak Setuju  
d. STS: Sangat Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya menyetujui pajak bumi dan bangunan (PBB)	✓			
2.	Saya membayar PBB tepat waktu				✓
3.	Saya merasa memiliki kewajiban membayar pajak	✓			
4.	Saya mengetahui dan paham tentang PBB yang harus dibayar	✓			
5.	Penghasilan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak			✓	
6.	Besarnya PBB sesuai dengan pendapatan	✓			
7.	Jarak tempat tinggal yang jauh membuat masyarakat malas membayar pajak				✓
8.	Tempat pembayaran pajak yang sulit dijangkau				✓
9.	Semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan			✓	
10.	Pekerjaan saya memudahkan untuk membayar PBB	✓			
11.	Pemahaman dan pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah			✓	
12.	Sistem pajak yang berlaku mudah dipahami			✓	
13.	Petugas pajak memberikan penyuluhan dengan jelas				✓





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**  
**ABSTRAK**

NAMA MAHASISWA	KHUSNUL KHAIRIAH,			
NIM	105731118719			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	<i>Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa tibona kecamatan bulukumpa kabupaten Bulukumba.</i>			
NAMA PEMBIMBING 1	Amran, SE., M. Ak., Ak., CA			
NAMA PEMBIMBING 2	Asriani Hasan, SE., M. Sc			
NAMA VALIDATOR	Sherry Adelia S.E, M.Mktg			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	08 Juni 2023	typo penulisan diperhatikan kata kunci kenapa tdk ada ?	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**  
**PENELITIAN KUANTITATIF**

<b>NAMA MAHASISWA</b>	Khusnul Khairiah			
<b>NIM</b>	105731118719			
<b>PROGRAM STUDI</b>	Akuntansi			
<b>JUDUL SKRIPSI</b>	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak PBB Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba			
<b>NAMA PEMBIMBING 1</b>	Amran, SE.,M.Ak.,Ak.,CA			
<b>NAMA PEMBIMBING 2</b>	Asriani Hasan, SE.,M.Sc			
<b>NAMA VALIDATOR</b>	Dr. Sitti Nurbaya, S.Pd.,M.M			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Instrumen Pengumpulan data (data primer)	26 Mei 2023	Terdapat Instrumen Pengumpulan data (data primer)	
2	Sumber data (data sekunder)	26 Mei 2023	Tidak terdapat Sumber data (data sekunder)	
3	Raw data/Tabulasi data (data primer)	26 Mei 2023	Terdapat tabulasi data	
4	Hasil Statistik deskriptif	26 Mei 2023	Terdapat Hasil Statistik deskriptif	
5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	26 Mei 2023	Terdapat Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	
6	Hasil Uji Asumsi Statistik	26 Mei 2023	Terdapat Hasil Uji Asumsi Statistik	
7	Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis	26 Mei 2023	Terdapat Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis	
8	Hasil interpretasi data	26 Mei 2023	Tidak terdapat Hasil interpretasi data	
9	Dokumentasi	26 Mei 2023	Terdapat Dokumentasi proses penilaian	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN BULUKUMPA  
DESA TIBONA**

Alamat : Jln.Puang Tuwo Dusun Bolaperringe Desa Tibona Kec. Bulukumpa Kab.Bulukumba

Tibona, 30 Mei 2023

Nomor : 32 / DTB / V / 2023  
Lampiran :  
Perihal :Kesediaan Menerima Mahasiswa  
Untuk Melaksanakan Penelitian /  
Pengumpulan Data.

Kepada  
Yth. Ketua LP3M Universitas  
Muhammadiyah Makassar  
di -  
Makassar

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bulukumba perihal Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa Kantor desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada dasarnya **bersedia menerima dan memberikan kesempatan** bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20 April s.d 20 Juni 2023 dalam rangka penyelesaian tugas akhir pendidikan (skripsi).

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni **KHUSNUL KHAIRIAH** Nomor Pokok Mahasiswa 105731118719 Program Studi Akuntansi dengan judul penelitian "*Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*".

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Tembusan ddh :

1. Yth. Bapak Bupati Bulukumba (Sebagai Laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Khusnul Khairiah

NIM : 105731118719

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Kursiah, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

## BIOGRAFI PENULIS



Khusnul Khairiah, panggilan Ummul atau Khusnul, lahir di Bulukumba pada tanggal 23 Mei 2001 dari pasangan suami istri Bapak Ahmadong Istri Mariati. Peneliti ini anak terakhir dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di BTN Bumi Batara Mawang Permai Blok B6 Nomor 3 Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 358 Pengkaslu Lulus tahun 2013, MTs Negeri 1 Belopa Lulus Tahun 2016, SMA 12 Luwu Lulus tahun 2019. Dan mulai tahun 2019 mendaftar dan kuliah pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

